

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [14].

Fungsi-fungsi manajemen perpajakan adalah sebagai berikut [14]:

1. *Tax Planning*

Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

2. *Tax Administration/Tax Compliance*

Tax Administration/Tax Compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. *Tax Audit*

Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan

withholding tax (PPH Psl. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

Tax planning atau *tax management* memiliki banyak arti. Karena para pakar, praktisi, dan pengajar perpajakan mendefinisikannya menurut persepsi dan pemahaman mereka masing-masing. Namun, sebenarnya kita bisa menarik benang merahnya untuk mengetahui apa sebenarnya *tax planning* atau *tax management* itu dan sejauh mana ruang lingkupnya serta apa saja tujuannya [14].

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Sedangkan *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum [14].

Pemahaman yang baik mengenai hal-hal operasional dan struktur keuangan perusahaan, berguna dalam memperkirakan tarif pajak efektif. Perbedaan antara tarif pajak wajib dan tarif pajak efektif dapat muncul karena berbagai alasan. Alasan perbedaan tersebut diantaranya adalah kredit pajak, pemotongan pajak atas dividen, penyesuaian tahun sebelumnya, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Tarif pajak efektif bisa berbeda ketika perusahaan aktif di luar negara tempat mereka berdomisili. Tarif pajak efektif menjadi campuran dari tarif pajak yang berbeda di negara tempat kegiatan usaha dilakukan, berkaitan dalam menempatkan keuntungan yang dihasilkan di setiap negara tersebut. Jika sebuah perusahaan melaporkan laba yang tinggi disuatu negara dengan tarif pajak yang tinggi dan perusahaan melaporkan laba yang rendah disuatu negara dengan tarif pajak yang

rendah, tarif pajak efektif akan menjadi tarif rata-rata tertimbang, yang lebih tinggi dari tarif pajak rata-rata sederhana kedua negara [15].

Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat meminimalkan pajak mereka dengan menggunakan entitas tujuan khusus. Misalnya, beberapa perusahaan membuat pembiayaan dan kepemilikan khusus perusahaan untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Meskipun tindakan tersebut dapat menurunkan tarif pajak efektif secara substansial, tindakan tersebut juga menimbulkan risiko, apabila undang-undang perpajakan berubah. Catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dalam berbagai jenis, beberapa di antaranya dinilai dapat menyebabkan tarif pajak efektif tinggi ataupun rendah untuk sementara waktu [15].

Tarif pajak efektif relevan untuk memproyeksikan pendapatan pada laporan laba rugi. Dalam mengembangkan perkiraan tarif pajak efektif, perlu dilakukan analisis penyesuaian untuk suatu kejadian. Jika pendapatan dari metode ekuitas investasi dan komponen yang mudah berubah merupakan bagian penting dalam menghasilkan pendapatan sebelum pajak, maka tarif pajak efektif tidak akan memasukkan pendapatan metode ekuitas dan komponen yang mudah berubah menjadi pilihan yang lebih baik untuk memprediksi biaya pajak masa depan untuk sebuah perusahaan tersebut [15]. Manajemen perpajakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif/*Effective Tax Rate* (ETR) sebagai berikut [14]:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan sehingga akan memberikan kontribusi yang baik juga bagi perusahaan. Dalam melakukan manajemen pajak, perusahaan juga memiliki strategi yang optimal untuk mengelola laporan keuangan perusahaan. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan dalam meminimalkan pajak perusahaan.

2.1.2. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen atau pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen [16].

Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (*fraud audit*). Dalam hal ini, komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal (*outsourcing*), untuk melakukan audit investigatif (*investigative audit*) atau audit forensik (*forensic audit*) guna mengungkapkan terjadinya praktik kecurangan yang signifikan di perusahaan [17].

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi [16]:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas, komite audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap [18]:

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan audit internal dan audit eksternal.

Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan [18]. Berdasarkan penjelasan teori diatas, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [16]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.2)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bagian dari perusahaan yang berkewajiban membantu dewan komisaris dalam mengendalikan operasional perusahaan. Komite audit bertugas melakukan penyesuaian terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran yang penting dalam pengendalian laporan keuangan.

2.1.3. Tingkat Utang

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [19].

Rasio utang mengukur beban utang perusahaan secara keseluruhan dan campuran ekuitas dan utang. Rasio utang memberi kita gambaran tentang situasi *leverage* perusahaan. Rasio utang bisa baik, buruk, atau acuh tak acuh, bergantung pada sejumlah faktor termasuk siapa yang bertanya. Misalnya, rasio total utang yang tinggi mungkin bagus bagi pemegang saham yang tidak ingin mencairkan saham mereka tetapi buruk bagi kreditor perusahaan [20].

Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan solvabilitas yakni [19]:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah [19]:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

Tingkat utang memiliki sebutan lain yaitu rasio solvabilitas/rasio utang/*leverage*. Rasio ini digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva [21].

Salah satu cara menghitung tingkat utang adalah Rasio Utang terhadap Total Aktiva/*Debt to Asset Ratio*. *Debt to asset ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasio tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula, apabila rasionya rendah semakin kecil pula perusahaan dibiayai dengan utang [19].

Jika rata-rata industri 35%, maka DAR perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika

perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki [19]. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu [20]:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat utang yang diprosikan dengan DAR merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan seberapa besar aktiva dibiayai oleh utang. Rasio ini juga menggambarkan bagaimana risiko yang akan dialami perusahaan akibat tingkat utang yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utang akan mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan akibat beban bunga yang timbul tinggi.

2.1.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan [19].

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [19].

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian,

kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [19].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [19]:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk [19]:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dari neraca dan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan memperoleh laba bruto, cara manajemen mendanai investasinya, dan pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan [22].

Rasio pengembalian aset (ROA) mengukur hubungan antara laba bersih dan aset. Hasilnya bervariasi sangat banyak antara jenis industri, umumnya karena komposisi neraca. Industri manufaktur membutuhkan peralatan sehingga aset di

neraca akan lebih besar. Banyak analisis menganggap profitabilitas efisien untuk operasional perusahaan, karena juga menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan [23].

Rasio tingkat pengembalian yang paling bagus adalah rasio pengembalian aset karena memperhitungkan investasi yang dilakukan oleh semua penyedia modal, mulai dari kreditor jangka pendek hingga pemegang obligasi hingga pemegang saham. Oleh karena itu, basis untuk rasio pengembalian aset adalah dengan rumus total laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Pembilang rasio pengembalian atas aset tersebut akan menjadi ukuran pendapatan perusahaan untuk periode tersebut. Oleh karena itu, angka laba bersih yang digunakan dalam tingkat pengembalian aset adalah pendapatan setelah beban bunga dan pajak. Penyesuaian ini dianggap oleh kreditor sebagai salah satu rasio yang bagus dalam mengembalikan dana kepada perusahaan [24].

Tingkat ROA mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba secara independen dari pembiayaan aset tersebut. Dengan demikian, ROA yang dihitung dengan benar, tidak akan terpengaruh dengan proporsi utang dengan pembiayaan ekuitas dan biaya modal sejenis [25]. Pengembalian aset menunjukkan seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas [20]:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diprosikan ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pengembalian yang didapat perusahaan atas aset yang dikeluarkan perusahaan. Rasio ini juga digambarkan untuk memprediksi seberapa besar kegiatan operasional perusahaan dapat menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas sangat penting dalam kegiatan usaha perusahaan, karena profitabilitas dapat memprediksikan beban pajak yang akan dibayarkan.

2.1.5. Intensitas Aset Tetap

Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap tidak termasuk hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. Aset tetap yang dimiliki (bisa dari pembelian, pertukaran dengan aset lain atau surat berharga atau dibuat sendiri) oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi, nilainya relatif tinggi dan umurnya lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan alat-alat, kendaraan, dan lain-lain. Aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut [26]:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain.

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya (harga) perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi beban-beban dalam beberapa periode akuntansi. Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang [26]:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki masa manfaat yang terbatas.

3. Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan depresiasi dikelompokkan menjadi dua, yakni [26]:

1. Faktor-faktor fisik

Faktor-faktor fisik yang mengurangi fungsi aset tetap adalah aus karena dipakai, aus karena umur, dan kerusakan-kerusakan.

2. Faktor-faktor fungsional

Faktor-faktor fungsional yang membatasi umur aset tetap antara lain ketidakmampuan aset untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aset tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai.

Salah satu subklasifikasi dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan adalah aktiva tetap (*fixed assets*). Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan perusahaan [27].

Aktiva tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aktiva tetap semacam itu, di mana tidak secara langsung meningkatkan manfaat keekonomian masa yang akan datang dari suatu aktiva tetap tertentu yang ada dapat diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat keekonomian masa yang akan datang dari aktiva yang lain. Dalam keadaan ini, perolehan aktiva tetap semacam itu memenuhi kualifikasi pengakuan aktiva, karena memungkinkan manfaat keekonomian masa yang akan datang dari aktiva yang berkaitan untuk diperoleh perusahaan dalam kelebihan apa yang dapat diperoleh jika aktiva tetap tersebut tidak diperoleh. Tetapi, aktiva tersebut hanya diakui sepanjang hasil jumlah

tercatat aktiva tersebut dan aktiva yang berkaitan tidak melebihi jumlah total yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aktiva [27].

Intensitas aset tetap adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur aset. Intensitas aset tetap memberikan informasi tentang berapa banyak total aset yang terikat dalam aset tetap. Intensitas aset tetap adalah sektor khusus, misalnya, perusahaan industri berat (teknik mesin, semen, dan baja). Intensitas aset tetap dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan [28]. Berdasarkan pengertian diatas, maka rumus yang digunakan untuk menghitung intensitas aset tetap adalah sebagai berikut [28]:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (2.5)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap merupakan perbandingan seberapa besar aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi perbandingan jumlah aset tetap perusahaan maka beban penyusutan atas aset tetap perusahaan juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kreditor untuk memberikan pinjaman. Ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dana eksternal dengan kecenderungan bahwa perusahaan yang bertumbuh dengan pesat harus mengandalkan pinjaman eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana operasional perusahaan. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat akan lebih banyak mengandalkan dana eksternal. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dapat dikategorikan

menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar [29].

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No 20 Tahun 2008 pasal 1 tersebut mengkriterikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut [30]:

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Usaha Besar

Perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. Perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan besar [29].

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti biaya kebangkrutan. Proksi *size* biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres. Secara umum proksi dipakai *Logaritme* (log) atau *Logaritma natural Assets* [31]. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus [31]:

$$\text{Size} = \ln \text{Total Aset} \quad (2.6)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan perbandingan besar atau kecilnya suatu usaha dari suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi tolok ukur dalam mengambil suatu keputusan untuk kelangsungan hidup usaha suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan perusahaan harus lebih optimal.

2.1.7. Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi [32].

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi *monitoring* atas laporan keuangan. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran komisaris [29].

Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS [33].

Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Anggota dewan komisaris wajib

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dibagian atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dibagian atas, dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat komite lainnya. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku [32]. Berdasarkan pengertian diatas, maka rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah dewan komisaris adalah sebagai berikut [32]:

$$\text{Jumlah Dewan Komisaris} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris} \quad (2.7)$$

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris juga bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris wajib dimiliki oleh perusahaan karena sangat berkontribusi dalam mengelola suatu perusahaan.

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak sebagai variabel dependen, antara lain:

1. Indra Suyoto Kurniawan melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 44 perusahaan. Secara simultan hasil tidak disajikan. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan tingkat utang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara total aset dan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [4].

2. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 62 perusahaan. Secara simultan hasil tidak disajikan. Secara parsial *corporate governance* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dan *profitability* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sementara *size*, *leverage*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].
3. Mutia Dianti Afifah dan Mhd Hasymi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan total sampel sebanyak 48 perusahaan. Secara simultan hasil tidak disajikan. Secara parsial *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak sementara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan fasilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [6].
4. Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, dan Paza Kholila melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 12 perusahaan. Secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

5. Lis Djuniar melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan total sampel sebanyak 21 perusahaan. Secara simultan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [9].
6. Dewi Kusuma Wardani dan Hany Nur Setiya Putri melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap manajemen pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan total sampel sebanyak 24 perusahaan. Secara simultan profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dan intensitas aset tetap serta pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].
7. Deo Novrin Hasiholan Damanik dan Abdul Muid melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “*Corporate governance*, komite audit, kualitas audit, dan manajemen pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan total sampel sebanyak 22 perusahaan. Secara simultan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [12].

8. Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan penerapan *corporate governance* dan *social corporate* terhadap manajemen pajak”. Objek penelitian ini adalah manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan total sampel sebanyak 30 perusahaan. Secara simultan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sementara komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [10].
9. Tazkia Karin Manurung dan Astrie Krisnawati melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan”. Objek penelitian ini adalah sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis kuantitatif regresi data panel dengan total sampel sebanyak 16 perusahaan. Secara simultan jumlah dewan komisaris, komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sementara jumlah dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].
10. Yensi dan Amelia Sandra melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, dan derivatif keuangan terhadap *effective tax rate*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan total sampel sebanyak 51 perusahaan. Secara simultan kepemilikan manajerial, komite audit, dan derivatif keuangan berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Secara parsial komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*,

sementara kepemilikan manajerial, dan derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* [13].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Indra Suyoto Kurniawan (2019) [4]	Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Tingkat Utang b. Intensitas Aset Tetap c. Kepemilikan Institusional d. Komisaris Independen e. Total Aset f. Intensitas Persediaan</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Hasil tidak disajikan.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Tingkat utang, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Total Aset dan Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.</p>
Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) [5]	Pengaruh <i>size, leverage, profitability, inventory intensity, dan corporate governance</i> terhadap manajemen pajak	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Inventory Intensity</i> e. <i>Corporate Governance</i></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Hasil tidak disajikan.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. c. <i>Size, Leverage, dan Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p>
Mutia Dianti Afifah dan Mhd Hasymi (2020) [6]	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Intensitas Aset Tetap e. Fasilitas</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Hasil tidak disajikan.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Fasilitas berpengaruh negatif terhadap</p>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, dan Paza Kholila (2019) [7]	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. <i>Leverage</i> c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap.</p>	<p>Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p>
Lis Djuniar (2019) [9]	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p>
Dewi Kusuma Wardani dan Hany Nur Setiya Putri (2018) [8]	Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap manajemen pajak	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Tingkat Utang c. Intensitas Aset Tetap d. Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. b. Tingkat Utang berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. c. Intensitas Aset Tetap</p>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Deo Novrin Hasiholan Damanik dan Abdul Muid (2019) [12]	<i>Corporate governance</i> , komite audit, kualitas audit, dan manajemen pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi d. Komite Audit e. Kualitas Audit	dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. <u>Secara Simultan:</u> Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. <u>Secara Parsial:</u> Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.
Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali (2017) [10]	Hubungan penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>social corporate</i> terhadap manajemen pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris d. Komite Audit e. <i>Corporate Social Responsibility</i> f. Ukuran Perusahaan g. Profitabilitas	<u>Secara Simultan:</u> Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris, Komite Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. b. Komite Audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan Ukuran Perusahaan

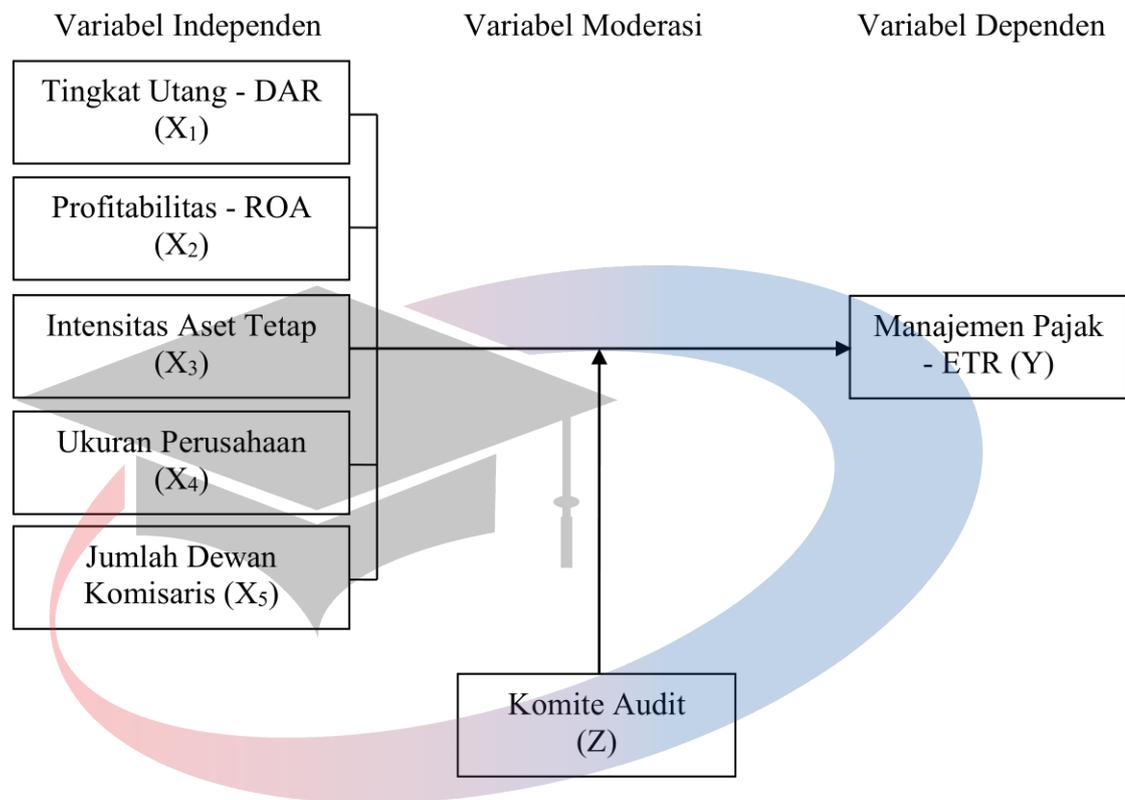
Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.
Tazkia Karin Manurung dan Astrie Krisnawati (2018) [11]	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap manajemen perusahaan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Jumlah Dewan Komisaris b. Komisaris Independen c. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. b. Jumlah Dewan Komisaris dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.</p>
Yensi dan Amelia Sandra (2019) [13]	Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, dan derivatif keuangan terhadap <i>effective tax rate</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Effective Tax Rate</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Komite Audit c. Derivatif Keuangan</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>. b. Kepemilikan Manajerial dan Derivatif Keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>.</p>

2.3. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Manajemen Pajak, variabel independen adalah Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris serta variabel moderasi dalam

penelitian ini adalah Komite Audit. Pengaruh setiap variabel digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak

Semakin tinggi tingkat utang maka beban bunga atas utang tersebut akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan laba menjadi lebih kecil akibat bunga atas utang perusahaan. Dengan demikian, maka akan menunjukkan adanya upaya dalam melakukan manajemen pajak yang diupayakan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : Tingkat Utang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset maka beban pajak penghasilan akan semakin tinggi. Sehingga manajemen perlu melakukan evaluasi dalam pengalokasian dana terhadap aset perusahaan. Alokasi dana tersebut bertujuan untuk

meningkatkan biaya seperti beban penyusutan, dengan meningkatkan jumlah pengembalian aset tetap dibandingkan dengan aset lancar, maka laba akan menurun dan beban pajak yang dibayarkan akan ikut menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2.4.3. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka beban penyusutan atas aset tetap perusahaan akan semakin tinggi pula. Hal ini menyebabkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Sehingga menyebabkan adanya upaya yang dilakukan perusahaan dalam memajemen pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan manajemen pajak yang baik. Sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasikan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2.4.5. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam suatu perusahaan maka anggaran perusahaan akan direncanakan lebih efektif. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris memiliki peran yang cukup penting dalam operasional perusahaan. Sehingga terdapat upaya dewan komisaris melakukan manajemen pajak dalam perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

2.4.6. Kemampuan Komite Audit dalam memoderasi Hubungan Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris Dengan Manajemen Pajak

Dengan adanya komite audit, pengevaluasian terhadap perencanaan dan pengendalian perusahaan di masa sekarang ataupun yang akan datang akan semakin optimal melalui tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris yang dijadikan sebagai objek-objek yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak yang lebih optimal. Oleh karena itu komite audit memiliki kemampuan dalam memoderasi hubungan tingkat utang, profitabilitas, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak.

H₂ : Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Jumlah Dewan Komisaris dengan Manajemen Pajak

UNIVERSITAS
MIKROSKIL